



**PERATURAN KALURAHAN  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TEPUS  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS  
KAPANEWON TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
D.I.YOGYAKARTA**

**TAHUN 2024**



LURAH TEPUS  
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN TEPUS  
NOMOR 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TEPUS,

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Tepus 2 Nomor 2 Tahun 2024;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo.

- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  10. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan

- (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
  15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
  16. Peraturan Desa Tepus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 2);
  17. Peraturan Desa Tepus Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 6);
  18. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2023 Nomor 2);
  19. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2024 Nomor 2);
- Memperhatikan :** Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN TEPUS  
dan  
LURAH TEPUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2025 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.498.016.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	28.537.582.388,00
Surplus/Defisit	Rp	25.039.565.788,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.079.565.788,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	25.039.565.788,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal.

#### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Tepus.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 30 Desember 2024



Diundangkan di Tepus

pada tanggal 30 Desember 2024



LEMBARAN KALURAHAN TEPUS TAHUN 2024 NOMOR 4

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN TEPUS  
 NOMOR 4 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.439.016.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.498.016.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.102.405.120,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.145.722.012,00	
5.3.	Belanja Modal	1.004.877.400,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	284.577.856,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>28.537.582.388,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(25.039.565.788,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.079.565.788,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	25.079.565.788,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>25.039.565.788,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Tepus, 30 Desember 2024  
 Lurah Tepus  
  
 HENDRO PRATOPO, S.IP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS  
 TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	50.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.439.016.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	8.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.498.016.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>26.257.934.032,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.393.247.408,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.200.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	929.225.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	929.225.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	61.530.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	61.530.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	125.629.728,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.629.728,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	72.247.780,00	ADD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.450.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.797.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	11.240.000,00	ADD, PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.240.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.099.780,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.099.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	45.115.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.115.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	36.960.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.960.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>109.580.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	14.850.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	35.000.000,00	ADD, DLL, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	5.000.000,00	PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.500.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.500.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	49.580.000,00	PBH
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000,00	
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	49.430.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>53.300.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.500.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	41.800.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.800.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	650.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	7.350.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>117.321.020,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.240.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.240.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.750.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	8.215.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.215.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.240.000,00	ADD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.240.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.500.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	11.650.000,00	PBH, PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.650.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.600.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	32.125.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.125.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	4.501.020,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.501.020,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	39.000.000,00	ADD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.500.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>24.584.485.604,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	3.305.000,00	PAD
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.305.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.500.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	24.562.180.604,00	DLL, PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.562.180.604,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	11.500.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.652.174.500,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>145.863.600,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	81.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.000.000,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/ Taman	10.000.000,00	DDS
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	25.000.000,00	PBP
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	29.863.600,00	DDS
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	275.000,00	
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	29.588.600,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>547.718.500,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Infentif)	46.800.000,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	14.620.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.620.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	226.855.000,00	DDS, PBH
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.105.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	210.750.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.250.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	6.717.500,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.717.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	13.650.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.650.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	58.536.000,00	DDS, PBP
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.536.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	2.140.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.140.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	166.200.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.200.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	7.950.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>573.267.400,00</b>	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	86.010.800,00	DDS
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	459.600,00	
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	85.551.200,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	265.459.800,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	264.819.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s elokan dll)	83.491.800,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	360.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	83.131.800,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	100.000.000,00	PBK
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	780.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	99.220.000,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Ber sejarah	38.305.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	315.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	37.990.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>197.825.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	151.905.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	151.905.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	45.920.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.920.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>14.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	14.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>173.500.000,00</b>	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	97.075.000,00	DDS, PBH
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.205.000,00	
2.8.90	5.3.	Belanja Modal	29.870.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa	4.925.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga oleh pemerintah kabupate	71.500.000,00	PBH
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.500.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>176.946.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>18.115.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	13.065.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.065.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.050.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.050.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>43.850.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.000.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	5.000.000,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	9.850.000,00	DLL, PBH
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	24.000.000,00	PBH, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>57.036.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	49.896.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	220.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	49.676.000,00	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.400.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	3.740.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.740.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>57.945.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	4.500.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.400.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	23.490.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.490.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	4.010.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.010.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	4.350.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	20.195.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.195.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>165.950.000,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>35.000.000,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	35.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>94.750.000,00</b>	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	9.850.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	69.900.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.900.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	10.000.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.175.000,00</b>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	2.175.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>20.525.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	15.525.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.525.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>3.500.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	3.500.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>284.577.856,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>28.882.856,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	28.882.856,00	ADD, DDS, DLL, F
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	28.882.856,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>39.695.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	39.695.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	39.695.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>216.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>28.537.582.388,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(25.039.565.788,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	25.079.565.788,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>25.039.565.788,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

